

DAFTAR ISI

	Hlm
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	32
1. Spesifikasi Penelitian.....	33
2. Metode Pendekatan	34
3. Tahap Penelitian	34
4. Teknik Pengumpulan Data	36
5. Alat Pengumpulan Data	37
6. Analisis Data	38
7. Lokasi Penelitian	39
8. Jadwal Penelitian.....	40

BAB II TINJAUAN ATAS USAHA PERGADAIAN, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN OTORITAS JASA KEUANGAN	42
A. Tinjauan Umum Usaha Pergadaian	42
1. Sejarah Usaha Pergadaian	42
2. Hakikat Koperasi Sebagai Badan Hukum	43
3. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam	48
a. Pengertian Kegiatan Usaha Simpan Pinjam	48
b. Bentuk Organisasi.....	49
c. Jaringan Pelayanan.....	50
d. Pengelolaan.....	50
e. Permodalan	51
f. Kegiatan Usaha	52
g. Pengawasan.....	52
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah	53
1. Pengertian Perlindungan Hukum	53
2. Prinsip Perlindungan Hukum.....	53
3. Pengertian Nasabah	54
4. Hak dan Kewajiban Nasabah	56
C. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	59
1. Pengerian Perbuatan Melawan Hukum	59
2. Sejarah dan Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum	61
D. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan	71
1. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan...	71
2. Konseptualisasi Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ..	75

BAB III PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PELAKU USAHA PERGADAIAN YANG TIDAK BERIZIN⁸²

A. Gambaran Umum Gadai Tidak Memiliki Izin Usaha.....	82
1. Kondisi KSP Gadai X.....	82
2. Syarat dan Ketentuan KSP Gadai X	83
B. Prosedur Pendirian Usaha Pergadaian Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.....	84
1. Tata Cara Pendaftaran Usaha Pergadaian	84
2. Perizinan Usaha Perusahaan Pergadaian	87
3. Pemberian Persetujuan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian Swasta	90
C. Cara Penyelesaian Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Perbuatan Melawan Hukum Dari Usaha Pergadaian Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pergadaian.	93
1. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.....	93
2. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan	102

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PELAKU USAHA PERGADAIAN YANG TIDAK BERIZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN (STUDI TERHADAP KSP GADAI X)..... **108** |

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Perbuatan Melawan Hukum Dari Pelaku Usaha Pergadaian Yang Tidak Berizin Dihubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.....	108
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Tidak Berizin Terhadap Nasabah Dihubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan	

Konsumen Sektor Jasa Keuangan jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	114
C. Solusi Yang Dapat Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Pergadaian Sebagai Bagian Industri Jasa Keuangan	127
BAB V PENUTUP	138
1. Kesimpulan	138
2. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	